



Subag Humas dan TU  
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

MEDIA
Antara sulteng

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Entitas :

✓																			
Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut						

## Gubernur Serahkan Laporan Keuangan ke BPK



GUBERNUR Sulawesi Tengah, Longki Djanggola dan bupati serta wakil bupati foto bersama dengan Kepala Perwakilan BPK Sulteng, M. Bayu Sabartha saat penyerahan laporan keuangan di kantor BPK, Jumat (15/3) siang. FOTO: Humas/bpk.sulteng

sekalius membentuk tim pendamping untuk membantu tim pemeriksa BPK untuk pengumpulan data yang diperlukan.

Gubernur berharap, laporan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2016 ini lebih baik dari laporan tahun sebelumnya. Paling tidak, sama dengan tahun sebelumnya.

Sebab, telah banyak perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti yang telah direkomendasikan BPK. Rekomendasi itu dalam rangka percepatan peningkatan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Longki, sesuai amanat undang-undang laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan

gubernur-bupati dan wali kota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain itu, kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sementara Kepala Perwakilan BPK Sulteng, M. Bayu Sabartha mengatakan, laporan keuangan yang diterimanya akan diperiksa untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan tersebut.

Ada empat aspek yang mendasari, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan

dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Aspek kedua adalah kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), dan aspek ketiga adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara aspek terakhir adalah efektifitas sistem pengendalian intern (SPI).

Menurut Bayu, LKPD yang disusun pemerintah daerah telah sesuai dengan aspek aspek tadi. Sebab bakekat pemberian opini merupakan pencerminan hasil penyajian atas LKPD untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah. Disebutkan, LKPD juga merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD. LKPD terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan

### Para Bupati Juga Serahkan Laporan Keuangan

PALU, MERCUSUAR - Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tengah kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tengah, M. Bayu Sabartha di kantor BPK, Jumat (15/3) siang.

Gubernur, Longki

mengemukakan hal itu usai menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tengah kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tengah, M. Bayu Sabartha di kantor BPK, Jumat (15/3) siang.

Bupati Buol, Bupati Banggai, Herwin Yatim, Bupati Morowali Utara, Bupati Sigi, Wakil Bupati Parigi Moutong, dan Wakil

Bupati Tojo Una-una juga ikut menyerahkan laporan keuangannya masing-masing ke BPK, diaksikan Sekwilda Derry Djanggola dan pejabat lainnya.

Selain menyerahkan data menurut Longki, OPD juga